

**SOSIALISASI TUGAS DAN WEWENANG POLRI, DALAM
PEMELIHARAAN KAMTIBNAS DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM
BINGKAI REFORMASI POLRI**

***DISSEMINATION ON THE DUTIES AND AUTHORITY OF THE
INDONESIAN NATIONAL POLICE (POLRI) REGARDING THE
MAINTENANCE OF PUBLIC ORDER AND SECURITY AND LAW
ENFORCEMENT WITHIN THE FRAMEWORK OF POLICE REFORM***

Hasan Muchtar Fauzi¹, Ilmiyah²

¹Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas
Abdurachman Saleh

²Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas
Abdurachman Saleh

Abstrak. merupakan salah satu institusi negara yang terdepan menjaga masyarakat. Situasi kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat mengenai sosialisasi tugas dan wewenang Polri, dalam pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum dalam bingkai reformasi Polri bersama akademisi memberikan edukasi hukum secara objektif, mengkaji efektivitas struktural kepolisian, dan mendorong mahasiswa menjadi agen perubahan serta mitra strategis dalam pelaksanaan tugas Polri.

Kata Kunci: Tugas dan Wewenang POLRI, Keamanan, Penegak Hukum

Abstract. The Indonesian National Police (Polri) carries out policing duties across the entire territory of Indonesia. The police force stands as a primary state institution dedicated to safeguarding the public. The entire community desires the realization of a secure and orderly environment—fostering a sense of peace and tranquility, boosting work motivation and morale by eliminating the fear of potential disturbances. Polri faces significant responsibilities regarding the prevention of violations and crimes, the provision of public services, and the protection and maintenance of public order. Community engagement initiatives—

conducted in collaboration with academics—focus on raising awareness about Polri's duties and authority in maintaining public order and enforcing the law within the framework of police reform. These initiatives provide objective legal education, evaluate the structural effectiveness of the police force, and encourage students to become agents of change and strategic partners in the execution of Polri's duties.

Keywords: Polri Duties and Authority, Security, Law Enforcement

PENDAHULUAN

Mahasiswa merupakan generasi muda yang memiliki peran strategis sebagai agen perubahan (agent of change), pengawas sosial (social control), dan calon pemimpin bangsa. Di tengah perkembangan teknologi informasi, globalisasi, serta dinamika kehidupan sosial yang semakin kompleks, mahasiswa dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, penyalahgunaan media sosial, penyalahgunaan narkoba, tindak pidana siber, radikalisme, serta berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya. Kondisi tersebut memerlukan upaya edukasi yang berkesinambungan agar mahasiswa memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum, keamanan, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sinergi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan kalangan akademisi menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun kesadaran hukum serta memperkuat budaya tertib, aman, dan bertanggung jawab di lingkungan perguruan tinggi. Polri memiliki peran dalam memberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi kepolisian, perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk kejahatan. Sementara itu, akademisi berperan memberikan perspektif ilmiah, kritis, dan edukatif sehingga mahasiswa mampu memahami berbagai isu hukum dan keamanan secara objektif dan komprehensif. Melalui kegiatan sosialisasi ini

diharapkan terjalin komunikasi yang baik antara Polri, akademisi, dan mahasiswa. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan literasi hukum, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam menciptakan lingkungan kampus dan masyarakat yang aman, damai, serta kondusif. Dengan terselenggaranya sosialisasi ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, tetapi juga mampu menjadi mitra strategis Polri dalam mendukung terciptanya keamanan, ketertiban, dan persatuan bangsa melalui sikap kritis, bertanggung jawab, serta berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE

Metode pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan sinergi antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan akademisi (dosen) sebagai narasumber kepada mahasiswa. Kegiatan dirancang secara sistematis melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. 1. Tahap Persiapan Tahap persiapan diawali dengan identifikasi kebutuhan dan analisis permasalahan yang dihadapi mahasiswa terkait pemahaman mengenai peran Polri, kesadaran hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta isu-isu aktual yang relevan dengan kehidupan kampus. Selanjutnya dilakukan koordinasi antara tim pengabdian dari perguruan tinggi dengan pihak Polri untuk menyusun konsep kegiatan, menentukan materi sosialisasi, menetapkan narasumber, serta menyusun jadwal pelaksanaan. Pada tahap ini juga disiapkan berbagai kebutuhan teknis, seperti

penyusunan materi presentasi, modul atau leaflet, instrumen pre-test dan post-test, daftar hadir peserta, dokumentasi kegiatan, serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan sosialisasi. 2. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan diawali dengan registrasi peserta dan pembukaan kegiatan oleh perwakilan perguruan tinggi yaitu Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Selanjutnya dilakukan penyampaian materi secara bergantian oleh narasumber dari Polri dan akademisi. Narasumber dari Polri memberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi Polri, kesadaran hukum, pencegahan tindak pidana, keamanan digital, serta peran generasi muda dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara itu, akademisi menyampaikan materi berdasarkan kajian ilmiah yang memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai aspek hukum, sosial, dan pendidikan kewarganegaraan. Metode penyampaian dilakukan secara interaktif melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus, serta pemberian contoh-contoh permasalahan yang sering dihadapi mahasiswa. Pendekatan partisipatif diterapkan agar peserta dapat menyampaikan pendapat, pengalaman, maupun pertanyaan sehingga tercipta proses pembelajaran dua arah yang efektif. 3. Tahap Evaluasi Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan sosialisasi dan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah diberikan. Evaluasi dilaksanakan melalui pemberian pre-test dan post-test untuk mengetahui peningkatan pengetahuan peserta. Selain itu, dilakukan penyebaran angket kepuasan peserta guna memperoleh masukan mengenai kualitas materi, metode penyampaian, kompetensi narasumber, serta manfaat kegiatan. Hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengabdian. Temuan dari proses evaluasi menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan dan pengembangan kegiatan sosialisasi pada masa mendatang sehingga program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang

lebih optimal bagi peningkatan pengetahuan, kesadaran hukum, dan partisipasi mahasiswa dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama akademisi kepada mahasiswa merupakan salah satu bentuk kolaborasi antara institusi penegak hukum dan perguruan tinggi dalam membangun kesadaran hukum, meningkatkan literasi keamanan, serta memperkuat karakter generasi muda. Kegiatan ini menjadi media edukasi yang memberikan pemahaman mengenai berbagai isu strategis, seperti ketertiban masyarakat, pencegahan tindak pidana, penyalahgunaan narkoba, kejahatan siber, radikalisme, serta etika bermedia sosial. Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, sosialisasi merupakan proses individu mempelajari nilai, norma, serta pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat sehingga mampu menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat. Dalam konteks sosialisasi Polri kepada mahasiswa, proses ini bertujuan menanamkan pemahaman mengenai kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan akademik dan masyarakat yang aman, tertib, serta berlandaskan nilai-nilai hukum. Oleh karena itu, sinergi antara Polri dan akademisi tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga membangun dialog yang kritis, ilmiah, dan konstruktif. Kehadiran akademisi dalam kegiatan sosialisasi memberikan perspektif teoritis dan berbasis penelitian, sedangkan Polri memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan,

tantangan di lapangan, serta upaya penegakan hukum yang dilakukan. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya kesadaran hukum, partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta kemampuan mahasiswa dalam menyaring informasi di era digital. Selain itu, sosialisasi ini juga menjadi wadah untuk memperkuat hubungan antara kepolisian, perguruan tinggi, dan masyarakat sebagai mitra dalam mewujudkan keamanan yang berkelanjutan. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan nilai yang hidup dalam masyarakat mengenai hukum yang berlaku. Kesadaran hukum mencakup empat indikator, yaitu:

- Pengetahuan hukum,
- Pemahaman hukum,
- Sikap terhadap hukum,
- Pola perilaku hukum.

Melalui sosialisasi, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengetahui aturan hukum, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa collaborative governance adalah proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara bersama-sama. Dalam kegiatan ini, Polri dan perguruan tinggi berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas edukasi hukum kepada mahasiswa sehingga tercipta sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan teori-teori tersebut, sosialisasi Polri bersama akademisi kepada mahasiswa merupakan bentuk pendidikan sosial yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, membangun kesadaran hukum, serta mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam menjaga

keamanan dan ketertiban masyarakat. Sinergi antara pendekatan praktis dari Polri dan pendekatan ilmiah dari akademisi menjadikan kegiatan sosialisasi lebih efektif dalam membentuk karakter mahasiswa yang taat hukum, kritis, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Kegiatan sosialisasi yang melibatkan Polri dan akademisi kepada mahasiswa berlangsung dengan baik serta mendapat respons yang positif dari peserta. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai program studi yang menunjukkan antusiasme tinggi selama penyampaian materi maupun sesi diskusi. Materi yang disampaikan mencakup peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pentingnya kesadaran hukum di kalangan generasi muda, pencegahan tindak pidana di lingkungan kampus, serta kontribusi akademisi dalam membangun budaya berpikir kritis dan berintegritas. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai fungsi dan tugas Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Mahasiswa juga memperoleh wawasan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum, etika dalam penggunaan media sosial, serta upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum seperti penyebaran hoaks, penyalahgunaan narkoba, perundungan, dan kejahatan siber. Selain itu, penyampaian materi oleh akademisi memberikan perspektif ilmiah mengenai hubungan antara hukum, pendidikan, dan kehidupan bermasyarakat sehingga mahasiswa mampu memahami permasalahan secara lebih komprehensif.



UNARS
UNIVERSITAS
Abdurachman Saleh Situbondo



UNARS BERSINERGI DENGAN POLRI DALAM SOSIALISASI PENEGAKAN HUKUM DAN KAMTIBMAS



Universitas Abdurachman Saleh Situbondo (UNARS) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan wawasan kebangsaan dan pemahaman hukum di kalangan mahasiswa melalui kegiatan Sosialisasi Tugas dan Wewenang Polri dalam Pemeliharaan Kamtibmas dan Penegakan Hukum dalam Bingkai Reformasi Polri. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 19 Mei 2026, bertempat di Aula Kampus I UNARS.

Acara diawali dengan sambutan dari Rektor UNARS, Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H., yang menegaskan pentingnya sinergi antara dunia akademik dan institusi kepolisian.

"Kampus memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang sadar hukum. Melalui kegiatan ini, kami berharap mahasiswa dapat memahami peran Polri secara lebih utuh dan objektif," ujarnya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber, yaitu AKBP Martin Lac Makalew, S.E., M.H., CPM., CPArb., CPA dari Polda Jawa Timur, Dr. Hasan Mochtar Fauzi, S.Sos., M.Si. selaku Dekan FISIP UNARS, serta Dr. Supriyono, S.H., M.Hum. selaku dosen Fakultas Hukum UNARS.

Dalam pemaparannya, AKBP Martin Lac Makalew menekankan bahwa Polri terus bertransformasi menuju institusi yang profesional dan humanis.

"Polri tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Reformasi Polri menuntut kami untuk semakin transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Dr. Hasan Mochtar Fauzi menyoroti pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam menjaga kamtibmas.

"Mahasiswa sebagai agen perubahan harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi serta mampu menjadi mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial," ungkapnya.

Senada dengan hal tersebut, Dr. Supriyono menambahkan bahwa pemahaman hukum perlu dibangun sejak dini.

"Penegakan hukum yang baik harus didukung oleh masyarakat yang sadar dan taat hukum. Edukasi seperti ini menjadi langkah penting dalam membangun budaya hukum di lingkungan akademik," tuturnya.

Antusiasme mahasiswa terlihat tinggi selama kegiatan berlangsung, ditandai dengan sesi diskusi interaktif yang membahas berbagai isu aktual terkait hukum dan keamanan di masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami fungsi Polri secara teoritis, tetapi juga mampu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berkeadilan.





unars_situbondo@unars.ac.id
www.unars.ac.id
 081232037760 | 081232037761 | 081232037721

PMB UNARS #AyoKuliahDiUnars






[unarskita](#)

[unarsofficial](#)

[@Unarskita](#)

Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Tugas Dan Wewenang Polri

Selama sesi tanya jawab, mahasiswa menunjukkan partisipasi aktif dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait implementasi hukum, mekanisme penegakan hukum, perlindungan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi Polri di era digital. Diskusi yang berlangsung secara interaktif mencerminkan

meningkatnya minat mahasiswa untuk memahami isu-isu hukum dan keamanan dari sudut pandang praktis maupun akademis. Berdasarkan hasil pembahasan, kolaborasi antara Polri dan akademisi terbukti memberikan nilai tambah dalam proses edukasi kepada mahasiswa. Polri menghadirkan pengalaman empiris mengenai praktik penegakan hukum di lapangan, sedangkan akademisi memperkuat materi melalui pendekatan teoritis dan analisis ilmiah. Sinergi tersebut menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif karena peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan normatif, tetapi juga memahami penerapan hukum dalam kehidupan nyata. Kegiatan sosialisasi ini juga berkontribusi dalam membangun hubungan yang lebih baik antara Polri, perguruan tinggi, dan mahasiswa. Melalui komunikasi yang terbuka, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pandangan, aspirasi, maupun kritik secara konstruktif sehingga tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai peran masing-masing pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan literasi hukum, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban, serta memperkuat kolaborasi antara Polri, akademisi, dan mahasiswa. Ke depan, kegiatan serupa diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tema-tema yang lebih spesifik sesuai perkembangan tantangan sosial dan teknologi, sehingga mampu menghasilkan generasi muda yang sadar hukum, berintegritas, dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kampus maupun masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi yang menghadirkan Polri dan akademisi kepada mahasiswa berlangsung dengan baik serta menjadi wadah yang efektif untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai berbagai isu hukum, keamanan, dan kehidupan bermasyarakat. Melalui penyampaian materi yang dipadukan dengan perspektif akademis dan pengalaman praktis dari Polri, mahasiswa memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi interaktif yang berlangsung selama kegiatan juga menunjukkan tingginya antusiasme mahasiswa dalam menyampaikan pertanyaan, gagasan, dan pandangan kritis terhadap berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Hal ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara institusi kepolisian, perguruan tinggi, dan mahasiswa sebagai agen perubahan dalam membangun budaya sadar hukum, memperkuat persatuan, serta menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif. Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin sinergi yang berkelanjutan antara Polri, kalangan akademisi, dan mahasiswa dalam mendukung terciptanya masyarakat yang berintegritas, berwawasan kebangsaan, serta mampu menghadapi dinamika sosial di era modern dengan sikap yang kritis, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta supremasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Berger, Peter L., and Thomas Luckman. "The Social Contruction of Reality, (terj), Hasan Basri, Tafsir Sosial Atas kenyataan." Jakarta: LP3ES: 1990.

Persada.

Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soejono. (1982). Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. (2002). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: PT.

Soekanto, Soerjono. (2011). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo